

Kelembagaan Pendukung Pembelajaran Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari

(Kasus di Kab. Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)

Farmers' Learning Support Institutions in Sustainable Private Forest Management

(The cases in Gunung Kidul District in DI Yogyakarta Province and Wonogiri District in Central Java Province)

Yumi¹, Sumardjo², Darwis S. Gani², dan Basita G. Sugihen²

¹Kementerian Kehutanan, Jakarta

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Abstract

Forest Management is facing the challenge of implementing the sustainable forest management which includes private forest. Successfully gained the Ecolabel Certificate, some private forest management units in Central Java and Yogyakarta's districts prove that the small units run by farmers are able to implement the sustainable forest management. The farmers' success in implementing the sustainable forest management must have been gained through learning process. How the learning process was and what farmers' learning support institutions influencing of the sustainable private forest management were, were the research questions of this study. The study used explanatory survey method on 200 farmers in Gunung Kidul and Wonogiri. Data collection was conducted from December 2009 to February 2010. The data were analyzed by using descriptive technique and Structural Equations Model (SEM). The conclusions are: (1) there are significant differentiation about farmer's learning support institutions in Gunung Kidul and Wonogiri. In Gunung Kidul District the institutions are integrated in one team work which legitimated by Bupati (the Head of District); (2) farmers' learning intensity is low. It was significantly influenced by farmers' learning support institutions; (3) farmers' learning intensity can be improved by farmer empowerment activities and competent personnels.

Keyword: Sustainable private forest management, farmers' learning process, support system of farmer's learning institutions, collaboration

Abstrak

Pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan hutan oleh masyarakat menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (lestari). Keberhasilan petani dalam pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri sampai memperoleh Sertifikat Ekolabel membuktikan bahwa masyarakat dapat mengelola hutan secara lestari. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari suatu proses belajar. Bagaimana pembelajaran masyarakat dan faktor penentu keberhasilan petani tersebut merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan 200 responden petani Hutan Rakyat sertifikasi di Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010. Analisa data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, *Structural Equations Model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan nyata antara kelembagaan pendukung pembelajaran petani di Gunung Kidul dan Wonogiri. Kelembagaan pendukung di Gunung Kidul terintegrasi dalam Pokja yang ditetapkan oleh Bupati; (2) intensitas belajar petani rendah, dipengaruhi secara nyata oleh kelembagaan pendukung pembelajaran petani; (3) intensitas belajar petani dapat ditingkatkan dengan kegiatan pemberdayaan dan personil yang kompeten.

Kata kunci: Pengelolaan hutan lestari, proses belajar petani, kelembagaan pendukung pembelajaran petani, kolaborasi

Pendahuluan

Kerusakan hutan yang semakin parah, baik akibat *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan, ketimpangan antara kapasitas ter-

pasang industri kehutanan dengan kemampuan penyediaan bahan baku kayu bulat merupakan sebagian permasalahan serius dalam pembangunan kehutanan. Di sisi lain kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar hutan juga merupakan masalah penting yang memerlukan perhatian khusus dalam pem-

¹ Korespondensi. Telepon: 081315889996
E-mail: fathursyifa.nita@yahoo.co.id

bangunan kehutanan. Hutan rakyat merupakan salah satu alternatif penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Badan Litbang) Kementerian Kehutanan, Forum Kehutanan Masyarakat (Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor), Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa hutan rakyat telah terbukti berperan dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam segi ekonomi, ekologi dan sosial. Darusman (1995) menegaskan bahwa bahwa hutan rakyat dan industri pengolahan hasilnya merupakan pilihan teknologi budidaya dan industri yang tepat guna bagi wilayah-wilayah berlahan marjinal dengan kondisi sosio budaya tradisional.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hutan rakyat ialah berkaitan dengan adanya *issue global warming* dan *ekolabel*, yang mensyaratkan kayu-kayu bersertifikat sebagai ketentuan untuk dapat masuk pasar kayu internasional. Unit manajemen pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri yang dikelola oleh masyarakat setempat telah membuktikan bahwa rakyat telah mampu mengelola hutan oleh rakyat secara lestari dan mendapatkan sertifikat Ekolabel.

Keberhasilan tersebut melewati suatu proses belajar, dan proses belajar masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan penyuluhan. Keberhasilan tersebut sangat terkait dengan peran berbagai institusi eksternal. Institusi eksternal apa saja yang berperan dan bagaimana institusi eksternal tersebut memainkan perannya dalam pembelajaran masyarakat menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dengan demikian tujuan penelitian adalah : 1) menganalisis kelembagaan eksternal apa saja yang mendukung pembelajaran petani dalam pengelolaan hutan rakyat lestari; 2) bagaimana pengaruh kelembagaan pendukung terhadap intensitas belajar petani dalam pengelolaan hutan rakyat lestari; dan 3) bagaimana meningkatkan peran kelembagaan pendukung pembelajaran petani tersebut.

Klausmeier dan Goodwin (1971), Soemanto (2006), Suryabrata (2006) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yang secara umum terbagi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar antara lain adalah: kompetensi pengajar; pendekatan atau metode pengajaran yang digunakan; lingkungan sosial dimana pembelajar tinggal atau bermasyarakat; dan kelembagaan yang memfasilitasi proses belajar. Penelitian ini memfokuskan kajian pada kelembagaan eksternal yang memfasilitasi proses belajar.

Kelembagaan yang memfasilitasi proses belajar ialah kelembagaan eksternal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagi kelembagaan eksternal yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan, baik kelembagaan penelitian, penyuluhan maupun perencanaan, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah harus melembagakan pendekatan dan struktur yang mendorong pembelajaran. Pretty (1997) mengemukakan bahwa untuk sistem pertanian berkelanjutan, selain teknologi konservasi sumberdaya alam dan pengembangan kelompok atau kelembagaan lokal, dibutuhkan unsur penting lainnya yaitu kelembagaan eksternal yang diorganisir, yang bekerja sama dengan kelembagaan lainnya dan petani, serta mengakomodir pengetahuan dan inisiatif masyarakat lokal.

Selanjutnya kelembagaan atau organisasi eksternal harus mengubah pola atau cara kerja mereka yaitu lebih ke arah multidisipliner, lebih banyak melibatkan komunitas petani (lebih partisipatif) dalam penelitian, penyuluhan dan kegiatan pembangunan, serta melakukan perubahan (evolusi) proses pembelajaran dalam organisasi dan pengembangan tenaga profesional pertanian itu sendiri secara menyeluruh. Kesuksesan kelembagaan eksternal ditentukan oleh sejauh mana mengakomodir orientasi utama atau nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat lokal, respons selama pelaksanaan dan pemberian kesempatan masyarakat lokal untuk mengambil keputusan.

Kontjaraningrat (1992) menyebutkan bahwa pranata sosial berpusat pada suatu ke-

lakukan berpola, dengan komponen-komponennya yaitu: 1) sistem norma; 2) tata kelakuan; 3) peralatan; dan 4) manusia atau personel yang melaksanakan kelakuan berpola tersebut. Sistem norma diturunkan dari nilai-nilai, sehingga sistem nilai berada lebih tinggi dari sistem norma.

Keberadaan kelembagaan pendukung pembelajaran petani berpengaruh terhadap intensitas belajar petani dalam pengelolaan HRL. Intensitas belajar petani dalam pengelolaan hutan lestari sangat bergantung pada interaksi yang terjadi antara: (1) petani dengan fasilitator/penyuluh, (2) petani dengan petani lainnya; (3) petani dengan kelompok; (4) petani dengan materi belajar; dan (5) petani dengan lingkungan belajarnya. Interaksi yang baik dihasilkan dari proses belajar yang baik, dan begitu sebaliknya proses belajar yang baik menghasilkan interaksi yang baik. Proses belajar yang baik antara lain ditunjukkan oleh proses belajar yang dialogis atau "interaktif". Intensitas belajar tinggi dihasilkan dari proses belajar yang interaktif akan memberdayakan peserta belajar, sebaliknya proses belajar yang "pasif" atau yang menempatkan peserta belajar sebagai obyek, bukan subyek dalam proses belajar akan menyebabkan petani yang tidak berdaya. Dalam intensitas belajar yang tinggi, frekuensi dan intensitas komunikasi banyak, komunikasi dilakukan dengan berbagai cara, serta manfaat adanya interaksi sangat mendukung proses belajar. Sebaliknya pada intensitas belajar yang rendah, frekuensi dan intensitas komunikasi kurang, komunikasi dilakukan secara terbatas, dan manfaat interaksi bagi proses belajar kurang dirasakan.

Metode Penelitian

Desain penelitian adalah survey, dan penelitian bersifat penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) yaitu menjelaskan hubungan kausalitas antara peubah-peubah penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di wilayah yang terdapat unit usaha Hutan Rakyat yang dikelola oleh masyarakat dan telah berhasil mendapatkan sertifikat Ekolabel. Populasi adalah petani pengelola Hutan Rakyat Lestari (sertifikasi) di

Gunung Kidul dan Wonogiri. Teknik pengambilan sampel ialah dengan metode *stratified random sampling* dengan strata tingkat keaktifan dalam kelompok (pengurus dan bukan pengurus). Penentuan sampel penelitian menggunakan syarat minimal *Structural Equation Models* (SEM) yaitu 100-150 sampel. Wijanto (2008) dan Kusnendi (2008) menjelaskan bahwa penggunaan SEM dengan metode estimasi *maximum likelihood* memerlukan sampel sebanyak lima kali indikator-indikator (*observed variables*) yang ada dalam model, atau dapat ditetapkan dengan syarat minimal 100-150 sampel. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 200 orang, yang tersebar di lima desa: dua desa di Kabupaten Wonogiri dan tiga desa di Kabupaten Gunung Kidul. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan Pusat Kajian Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada. Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif menggunakan program SPSS 16.0, dan statistik inferensial *Structural Equation Models* (SEM), menggunakan program LISREL 8.70.

Hasil Dan Pembahasan

Hutan Rakyat di Gunung Kidul dan Wonogiri

Hutan Rakyat di Gunung Kidul dan Wonogiri memiliki luasan yang cukup besar, dibandingkan dengan luasan hutan negara di wilayah tersebut. Luas hutan rakyat menurut Data Statistik Kabupaten Gunung Kidul (2009) adalah 30.000 hektar, tersebar di 18 kecamatan, sementara luasan hutan negara 8.560 hektar. Luas hutan rakyat di Wonogiri 36.293 hektar yang tersebar di 25 kecamatan, sedangkan hutan negara seluas 16.268 hektar. Dengan cakupan luasan tersebut, potensi hutan rakyat dapat dilihat dari volume kayu yang dihasilkan per tahun yang cukup tinggi,

Gunung Kidul 122.460 m³ dan Wonogiri 264.159,1 m³.

Sejarah Hutan Rakyat di Gunung Kidul dan Wonogiri menurut Awang dkk (2001) hampir sama. Sebagian besar lokasi penelitian di Gunung Kidul dan Wonogiri termasuk ke dalam Zona Pegunungan Seribu (Sewu) atau sering disebut Pegunungan Kapur Selatan. Sejarah Hutan Rakyat di Pegunungan Kapur Selatan menurut Awang dkk. (2001) dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu (1) sebelum tahun 1960 periode kritis; (2) 1960-1970 periode penanaman mandiri; (3) 1970-1985 periode intensifikasi; dan (4) 1985-sekarang periode pemudaan alam. Sejak tahun 2002 hingga sekarang Hutan Rakyat berkembang pesat, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), yang sering disebut GERHAN), yang dicanangkan oleh Pemerintah, sejak 2002 telah meningkatkan luas Hutan Rakyat di daerah-daerah kritis, termasuk di Gunung Kidul dan Wonogiri.

Sertifikasi Hutan Rakyat di Wonogiri dimulai pada tahun 2003, diawali dengan pengembangan kapasitas organisasi Hutan Rakyat melalui kerjasama dengan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan World Wildlife Fund (WWF). Tujuan saat itu adalah pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) di Desa Selopuro dan Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno. Sedangkan proses sertifikasi Hutan Rakyat di Gunung Kidul dimulai pada tahun 2004, diawali dengan program Rancang Bangun Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari (RBUMHRL) di 4 kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Wonosobo, Magelang dan Purworejo. Kegiatan RBUMHRL di Gunung Kidul mencakup Desa Girisekar dan Desa Dengok, yang menjadi lokasi penelitian ini. Pada bulan Oktober 2004, Wonogiri mendapatkan sertifikat Ekolabel (PHBML) yang pertama dengan luas cakupan 809,95 hektar. Dua tahun kemudian menyusul Gunung Kidul mendapat sertifikat PHBML yaitu pada tanggal 20 September 2006 yang mencakup luasan 815,18 hektar.

Kelembagaan Pendukung Pembelajaran Petani

Lembaga pendukung pembelajaran pengelolaan HRL di Gunung Kidul yang dinilai masyarakat berperan dalam pembelajaran Hutan Rakyat Lestari ialah Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) – Universitas Gadjah Mada (UGM), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul, LSM Shorea, dan LSM Arupa. Berbeda dengan Gunung Kidul, lembaga pendukung pembelajaran HRL di Wonogiri yang berperan, walaupun peranannya tidak terlalu besar, menurut masyarakat ialah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Wonogiri serta PERSEPSI.

Penilaian petani sertifikasi/Hutan Rakyat Lestari secara keseluruhan terhadap kelembagaan pendukung pembelajaran di Gunung Kidul dan Wonogiri tergolong sedang. Terdapat perbedaan nyata antara penilaian petani sertifikasi di Gunung Kidul dan Wonogiri terhadap kelembagaan pendukung pembelajaran HRL. Skor rata-rata penilaian petani HRL di Gunung Kidul sedang, sedangkan di Wonogiri tergolong rendah. Perbedaan mendasar yang membedakan pembelajaran HRL di Gunung Kidul dan Wonogiri adalah sinergitas kelembagaan pendukung pembelajaran HRL. Pembelajaran HRL di Gunung Kidul direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi secara terpadu oleh suatu Kelompok Kerja (POKJA) Hutan Rakyat Lestari, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Kidul tanggal 20 September 2005. Pokja HRL tersebut, terdiri dari berbagai kalangan, baik pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat petani.

Kesesuaian Nilai

Menurut sejarah hutan rakyat di Gunung Kidul, pada tahun 1950-an ada perbedaan nilai hutan dan kayu antara masyarakat dengan pemerintah. Pada saat itu masyarakat dilarang menanam tanaman kayu-kayuan, khususnya jati karena sebagai pengelola hutan negara. Perbedaan nilai hutan dan kayu pada saat itu menyebabkan masyarakat begitu sulit

Tabel 1. Perbandingan penilaian kelembagaan pendukung pembelajaran oleh petani HRL di gunung kidul dan wonogiri

No	Aspek kelembagaan pendukung	Kategori	Hutan Rakyat Lestari (%)		
			Gunung Kidul	Wonogiri	Total
1	Kesesuaian nilai	Rendah	11,0	58,0	34,5
		Sedang	55,0	36,0	45,5
		Tinggi	34,0	6,0	20,0
		<i>Skor Rataan</i>	<i>67,0</i>	<i>37,3</i>	<i>52,4</i>
2	Dukungan kegiatan	Rendah	9,0	83,0	46,0
		Sedang	58,0	16,0	37,0
		Tinggi	33,0	1,0	17,0
		<i>Skor Rataan</i>	<i>72,4</i>	<i>34,3</i>	<i>53,4</i>
3	Dukungan fasilitas	Rendah	17,0	91,0	54,0
		Sedang	62,0	9,0	35,5
		Tinggi	21,0	0,0	10,5
		<i>Skor Rataan</i>	<i>63,4</i>	<i>32,9</i>	<i>48,1</i>
4	Dukungan personil	Rendah	13,0	87,0	50,0
		Sedang	55,0	13,0	34,0
		Tinggi	32,0	0,0	16,0
		<i>Skor Rataan</i>	<i>69,3</i>	<i>34,2</i>	<i>51,7</i>

Keterangan:

- $n(\text{Gunung Kidul})=100$, $n(\text{Wonogiri})=100$, $n \text{ total}=200$;

- *Skor Rataan*: Rendah (0-50,0); Sedang (50,1-75,0); Tinggi (75,1-100)

memasuki kawasan hutan negara, yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada saat itu pemerintah menilai hutan sebagai kawasan konservasi yang harus dilindungi, termasuk dari masyarakat yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap hutan. Saat ini sudah ada kesesuaian nilai hutan dan kayu bagi masyarakat dengan Dinas Kehutanan. Bahkan di Gunung Kidul, lahan hutan negara yang dikelola Dinas Kehutanan Propinsi, yang pada saat ini ditanami dengan tanaman kayu putih, dapat juga dikelola oleh masyarakat dengan menanam lahan "bahan" tersebut dengan tanaman pangan. Dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini Dinas Kehutanan mendapat keuntungan dengan terpeliharanya tanaman kayu putih, dan masyarakat dapat ikut menggunakan lahan negara "bahan" untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sedangkan petani sertifikasi/HRL di Wonogiri belum melihat adanya kesamaan nilai hutan antara masyarakat dengan Dishutbun, maupun dengan PERSEPSI. Skor rata-rata untuk kesesuaian nilai di Wonogiri tergolong rendah.

Dukungan kegiatan

Dukungan kegiatan, khususnya berkaitan dengan pembelajaran dan pengembangan HRL di kedua lokasi dinilai berbeda oleh petani responden penelitian. Dukungan kegiatan lembaga pendukung di Gunung Kidul dinilai sedang, sedangkan di Wonogiri termasuk rendah. Petani HRL di Gunung Kidul menilai sejak adanya pendampingan dari PKHR, Lembaga Arupa, Yayasan Shorea dan Dishutbun (yang tergabung dalam Pokja HRL), cukup banyak kegiatan bermanfaat yang difasilitasi oleh lembaga pendukung tersebut, bahkan kegiatan masih terus dilakukan walaupun proses sertifikasi telah selesai dilakukan. Dukungan kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, magang, studi banding bagi para pengurus/anggota kelompok. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, terutama berkaitan dengan mengurangi kebiasaan masyarakat "tebang butuh" kayu-kayu yang belum waktunya untuk ditebang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama memberikan alternatif usaha kepada petani untuk menanggulangi kebutuhan dana mendasak. Dengan demikian kegiatan yang dilaku-

kan di Gunung Kidul lebih difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, dan dilakukan secara kontinyu/berkelanjutan.

Selain itu bantuan-bantuan dari berbagai pihak maupun kegiatan kunjungan-kunjungan, termasuk Belajar Antar Petani, Pelatihan petani se-ASEAN yang dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak perguruan Tinggi, maupun LSM telah meningkatkan aktivitas pembelajaran petani HRL di Gunung Kidul. Berbeda dengan Gunung Kidul, di Wonogiri walaupun ada pendampingan dari PERSEPSI, tetapi hanya berkaitan dengan proses pengajuan sertifikasi yaitu pemetaan, inventarisir hutan dan lainnya. Dukungan kegiatan pada seluruh kelompok tidak berlanjut setelah proses sertifikasi selesai. Dengan demikian berbeda dengan Gunung Kidul, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendukung di Wonogiri lebih difokuskan kepada upaya perolehan sertifikasi dan sedikit sekali ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani, dan tidak dilakukan

Dukungan fasilitas

Dukungan fasilitas yang diberikan lembaga pendukung pembelajaran HRL, dinilai sudah cukup baik oleh masyarakat Gunung Kidul. Sedangkan bagi masyarakat Wonogiri dukungan fasilitas dari lembaga pendukung masih kurang. Selain Keputusan Pokja, adanya peraturan dan Keputusan oleh Bupati tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari memberikan dampak besar terhadap pengembangan HRL di Gunung Kidul. Sampai dengan penelitian ini dilakukan sedang dirumuskan konsep Perda Hutan Rakyat Lestari oleh Pokja HRL. Untuk petani HRL di Wonogiri, secara umum penganggaran dari Dishutbun memang kurang karena diprioritaskan pada lokasi dengan persentasi lahan-lahan kritis yang tinggi. Tetapi PERSEPSI, yang menjalin kemitraan dengan WWF dan LEI telah berupaya untuk memberikan fasilitas berupa workshop pengolahan limbah kayu. Pemasaran produk ini juga difasilitasi oleh WWF dengan membuka *galery Green Living* di Jakarta.

Dukungan personil

Penilaian dukungan personil, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi, yang diberikan oleh lembaga pendukung dalam memfasilitasi pembelajaran HRL antara kedua lokasi berbeda nyata. Petani HRL di Gunung Kidul menilai dukungan personil dalam pembelajaran petani cukup baik, sedangkan di Wonogiri tergolong rendah. Perbedaan penilaian terhadap dukungan personil di kedua lokasi, di antaranya dapat dilihat dari jumlah penyuluh kehutanan: di Gunung Kidul 1 orang penyuluh kehutanan membina 3-4 desa. sedangkan di Wonogiri 1 orang penyuluh kehutanan membina 8-10 desa. Dalam hal kompetensi, penyuluh di Wonogiri sangat terbatas mendapatkan pelatihan, sedangkan di Gunung Kidul selain penyuluh kehutanan juga terdapat tenaga pendamping dari LSM yang sangat kompeten untuk masalah teknis kehutanan, karena sebagian besar dari pendamping adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM.

Intensitas Belajar Petani

Secara keseluruhan intensitas belajar petani Hutan Rakyat Lestari di kedua lokasi rendah (Tabel 2). Terdapat perbedaan nyata antara intensitas belajar petani Hutan Rakyat Lestari di Gunung Kidul dan Wonogiri. Semua indikator intensitas belajar di Gunung Kidul tergolong sedang, sedangkan di Wonogiri tergolong rendah.

Interaksi petani dengan petani di kedua lokasi paling tinggi, yang mengindikasikan petani sertifikasi, baik di Gunung Kidul maupun Wonogiri masih lebih banyak memanfaatkan pembelajaran melalui sesama petani. Sedangkan interaksi petani dengan materi belajar paling rendah, hal ini berkaitan dengan rendahnya petani memanfaatkan sumber-sumber materi pembelajaran di luar apa yang didapatkan dari penyuluh melalui pertemuan kelompok. Bila dikaitkan dengan tipe pembelajaran menurut Dwiyogo (2001), pembelajaran petani di kedua lokasi tersebut belum mengarah ke pembelajaran visioner, dimana pembelajaran dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja, melalui apa saja. Artinya pembelajaran tidak tergan-

Tabel 2. Intensitas belajar petani hutan rakyat lestari (sertifikasi) di gunung kidul dan wonogiri

No	Aspek intensitas pembelajaran	Kategori	Hutan Rakyat Lestari (%)		
			Gunung Kidul	Wonogiri	Total
1	Interaksi petani dengan penyuluh	Rendah	32,0	84,0	58,0
		Sedang	58,0	14,0	36,0
		Tinggi	10,0	2,0	6,0
		<i>Skor Rataan</i>	52,4	26,8	39,6
2	Interaksi petani dengan petani	Rendah	10,0	18,0	14,0
		Sedang	69,0	74,0	71,5
		Tinggi	21,0	8,0	14,5
		<i>Skor Rataan</i>	64,9	57,0	61,0
3	Interaksi petani dengan kelompok tani	Rendah	13,0	27,0	20,0
		Sedang	75,0	70,0	72,5
		Tinggi	12,0	3,0	7,5
		<i>Skor Rataan</i>	57,2	48,7	53,0
4	Interaksi petani dengan materi pembelajaran	Rendah	33,0	84,0	58,5
		Sedang	59,0	15,0	37,0
		Tinggi	8,0	1,0	4,5
		<i>Skor Rataan</i>	51,4	24,2	37,8
5	Interaksi petani dengan lingkungan belajar	Rendah	34,0	60,0	47,0
		Sedang	57,0	40,0	48,5
		Tinggi	9,0	0,0	4,5
		<i>Skor Rataan</i>	49,4	37,7	43,6

Keterangan:

- $n(\text{Gunung Kidul})=100$, $n(\text{Wonogiri})=100$, $n \text{ total}=200$;

- *Skor Rataan*: Rendah (0-50,0); Sedang (50,1-75,0); Tinggi (75,1-100)

tung pada suatu tempat, pada suatu waktu tertentu dengan sumber belajar yang tidak terbatas pada guru, dalam hal ini penyuluh/pendamping.

Interaksi antara Penyuluh dengan Petani

Interaksi petani dengan penyuluh atau pendamping di kedua lokasi tergolong rendah. Tetapi bila diperbandingkan antara kedua lokasi tersebut terdapat perbedaan nyata, yaitu di Gunung Kidul tergolong sedang sedangkan di Wonogiri tergolong rendah. Sebagian besar petani (63,3%) di Wonogiri sangat jarang bertemu dengan penyuluh atau pendamping, bahkan beberapa orang menyebutkan sampai dengan penelitian ini dilakukan belum pernah bertemu dengan penyuluh atau pendamping.

Berbeda dengan Wonogiri, di Gunung Kidul frekuensi petani bertemu dengan penyuluh dan pendamping lebih sering, terutama pada saat pendampingan sertifikasi HR dan juga sebelumnya pada program rancang bangun unit manajemen HR (RBUMHR). Per-

temuan dengan penyuluh atau pendamping terutama pada kegiatan pertemuan kelompok atau diskusi lainnya berkaitan dengan sertifikasi atau RBUMHR, khususnya untuk Desa Girisekar dan Desa Dengok yang didampingi oleh LSM Shorea dan Arupa untuk RBUMHR. Untuk Desa Kedungkeris frekuensi lebih banyak dan hubungan lebih akrab karena pendamping yang berasal dari PKHR telah mendampingi secara rutin dari tahun 2000 terus sampai saat penelitian dilakukan. Namun diakui oleh petani HRL di Gunung Kidul, karena pertemuan dengan pendamping atau penyuluh lebih sering dalam pertemuan formal sehingga hubungannya akrab namun seperti masih ada 'jarak'. Hal ini sejalan dengan pendapat Flander (1969), diacu dalam Klausmeier dan Goodwin (1971) yang menyebutkan bahwa interaksi guru dan murid sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal, komunikasi verbal dan non verbal. Interaksi guru dan murid terjadi jika ada komunikasi dua arah dan seimbang.

Interaksi Petani dengan Petani

Interaksi petani dengan petani (Tabel 2) di kedua lokasi tergolong sedang. Hubungan yang baik antar petani, baik untuk permasalahan umum maupun yang berkaitan dengan pengelolaan usahatani, ditunjang oleh masih kuatnya hubungan persaudaraan pada masyarakat Gunung Kidul dan Wonogiri. Hubungan persaudaraan masyarakat di Gunung Kidul dan Wonogiri masih cukup baik, dibuktikan dengan masih berjalannya dan kentalnya budaya “sambatan”, *jagong* dan lainnya. Juga berkaitan dengan pengalaman m saat-saat sulit menghadapi kondisi lahan yang tandus, kekeringan dan kelaparan, kemudian berjuang bersama hingga mencapai kondisi lingkungan yang baik, dan perekonomian yang lebih baik. Interaksi yang baik antar petani, dan masih kentalnya hubungan persaudaraan membuat situasi yang aman dalam berusahatani, tidak ada konflik berkaitan dengan batas lahan, hampir tidak ada kasus pencurian di ladang, saling menghormati dan ikut menjaga lahan usaha tetangganya dengan menjaga jarak tanam di perbatasan lahannya.

Interaksi antara Petani dan Kelompok Tani

Terdapat perbedaan nyata antara interaksi petani dengan kelompok tani di kedua lokasi. Petani di Gunung Kidul menilai interaksi dengan Kelompok Tani tergolong sedang, sedangkan petani di Wonogiri menilai rendah. Beberapa hal yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut antara lain ialah pendampingan kelompok tani di Gunung Kidul pada saat penelitian dilakukan masih terus berjalan, sekalipun telah diperoleh sertifikasi. Sehingga pertemuan kelompok masih terus berjalan, walaupun sebagian besar lebih difokuskan pada arisan. Sedangkan di Wonogiri ada permasalahan dan kekecewaan anggota terhadap kepengurusan, terutama Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) yang sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum ada upaya untuk menyelesaikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Flander (1969), diacu dalam Klausmeier dan Goodwin (1971) yang menyebutkan bahwa interaksi sesama murid, akan mendukung pencapaian tujuan kelompok.

Kekoheisan kelompok sangat berperan dalam mendukung proses belajar.

Interaksi antara Petani dengan Materi Pembelajaran

Interaksi petani dengan materi belajar di kedua lokasi berbeda nyata, di Gunung Kidul tergolong sedang, sedangkan di Wonogiri tergolong rendah. Adanya perbedaan yang cukup mencolok ini berkaitan erat dengan keberadaan Kelompok Tani di Wonogiri yang sudah tidak terlalu aktif menjadi tempat pembelajaran petani HRL. Interaksi petani dengan materi belajar di Gunung Kidul cukup baik, walaupun kesempatan berinteraksi tersebut tidak merata karena lebih banyak kesempatan yang diperoleh pengurus kelompok tani dan tokoh masyarakat. Berkaitan dengan HRL, materi belajar yang didapatkan petani ialah pemetaan partisipatif, inventarisasi tegakan pohon, dan perencanaan pengelolaan HR. Sebagian besar materi merupakan ‘*given*’ dari lembaga pendukung pendampingan. Namun pada beberapa kelompok di Gunung Kidul, terdapat beberapa materi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani, misalnya pelatihan/magang pembuatan furniture.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi petani dan materi pembelajaran di kedua lokasi masih terbatas pada pertemuan kelompok dan penyuluh/pendamping sebagai sumber materi, dimana materi “*given*” kurang sesuai kebutuhan. Hal ini belum mencapai apa yang diharapkan dengan pembelajaran orang dewasa yang dikembangkan oleh Knowles (1980), Jarvis (1985), yang menekankan pada pembelajaran pada pemecahan permasalahan dan materi sesuai dengan kebutuhan petani sehingga dapat membantu petani menyelesaikan permasalahannya.

Interaksi Petani dengan Lingkungan Belajar

Interaksi petani dengan lingkungan belajar di kedua lokasi tergolong rendah. Petani sedikit memiliki akses untuk berinteraksi dengan lingkungan belajar, yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat lestari. Lingkungan belajar dalam hal ini hal-hal yang mendukung proses belajar HRL, baik sarana

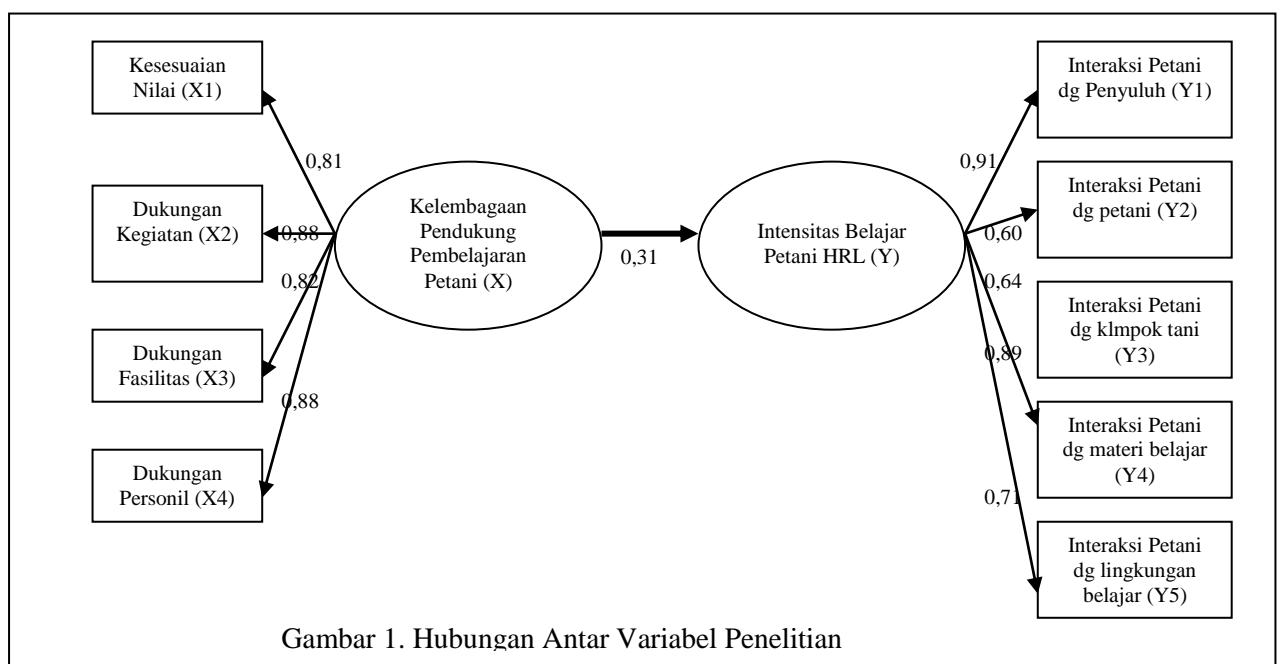
prasarana, institusi yang mendukung proses belajar dan lainnya. Di Gunung Kidul sebenarnya sudah ada sarana pembelajaran untuk mengelola pemasaran HRL yaitu Koperasi Wana Manunggal Lestari yang mewadahi petani sertifikasi di Gunung Kidul, tetapi aksesnya sangat terbatas, karena letaknya di desa yang berbeda kecamatan, sehingga sulit bagi petani dari desa lainnya untuk menjangkau. Akses bagi anggota terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembelajaran Hutan Rakyat Lestari, juga sangat sulit dijangkau. Tegalan, pekarangan tempat mereka mengelola lahan adalah lingkungan belajar yang baik, mudah dijangkau oleh semua petani, tetapi seringkali tidak disadari oleh petani, sehingga memerlukan pendampingan agar petani dapat menyadari, memanfaatkannya dalam pembelajaran hutan rakyat lestari.

Pengaruh Kelembagaan Pendukung Pembelajaran Terhadap Intensitas Belajar Petani

Hasil analisa SEM menunjukkan bahwa kelembagaan pendukung berpengaruh nyata terhadap intensitas belajar petani HRL. Aspek kelembagaan pendukung pembelajaran petani HRL yang berpotensi mempengaruhi intensitas belajar petani ialah dukungan kegiatan dan dukungan personil (Gambar 1). Adanya dukungan kegiatan nyata dan berkelanjutan

an yang berkaitan dengan pembelajaran petani, serta personil yang kompeten yang ditempatkan oleh lembaga pendukung pembelajaran untuk mendampingi pembelajaran petani HRL memberikan pengaruh terhadap intensitas belajar petani HRL. Hal ini dapat dipahami, karena bentuk dukungan atau fasilitasi yang langsung bersentuhan, dirasakan dan dinikmati oleh petani adalah kegiatan pembelajaran dan kehadiran penyuluh/pendamping di desa untuk mendampingi petani dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.

Adanya perbedaan dukungan kegiatan dan dukungan personil, yang diberikan kelembagaan pendukung pembelajaran pada kedua lokasi penelitian menyebabkan intensitas belajar petani yang berbeda pula. Dukungan kegiatan dan personil yang lebih baik di Gunung Kidul memberikan pengaruh yang positif terhadap intensitas belajar petani, yang ditunjukkan dengan nilai skor yang cukup baik, yaitu tergolong kategori sedang. Dukungan kegiatan bermanfaat di Gunung Kidul yang difasilitasi lembaga pendukung, cukup banyak dan berkelanjutan. Bahkan sampai pada saat penelitian dilakukan, kegiatan pelatihan masih terus dijalankan. Pelatihan pembuatan *Virgin Coconut Oil (VCO)* di Kelompok Tani Dusun Jeruken dilakukan dalam rangka mencari alternatif usaha produktif untuk mengatasi kebiasaan tebang butuh bagi anggota kelompok. Demikian juga dengan Koperasi



Gambar 1. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Wana Manunggal Lestari, terus menerus di-dampingi untuk dapat lebih berkembang. Walaupun kegiatan pendampingan berkaitan dengan proses sertifikasi HRL telah selesai, tetapi kegiatan pemeliharaan dan pemantapan hasil sertifikasi terus dilakukan.

Sementara di Wonogiri dukungan kegiatan oleh lembaga pendukung pembelajaran petani HRL sangat terbatas, bahkan setelah proses sertifikasi selesai, tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan untuk pemantapan HRL. Memang ada usaha perbengkelan limbah industri per kayu yang masih terus dijalankan, tetapi tidak dikelola dengan baik dan melibatkan pengurus atau anggota lain, sehingga hanya dapat dinikmati oleh beberapa orang saja.

Demikian juga dengan dukungan personil untuk pembelajaran HRL. Dengan adanya Pokja HRL, terdapat kerja sama yang baik antara personil yang ditempatkan untuk mendampingi pembelajaran petani HRL di Gunung Kidul. Walaupun memang diakui sampai dengan saat ini, walaupun institusi pembina mereka tergabung dalam satu kelompok kerja (POKJA), namun untuk tim yang bertugas langsung mendampingi masyarakat di desa masih belum bersinergi dengan baik, terutama antara LSM, PT dengan penyuluh PNS dari Pemda. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kompetensinya, pendamping dari PT dan LSM sering bertemu, untuk dilatih dan sharing tentang permasalahan dan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada masyarakat. Penyuluh dari Dishutbun Kab. Gunung Kidul atau saat ini BP2KP belum terlibat banyak dalam pertemuan tersebut, padahal bila dapat bersinergi dalam pertemuan dan pelatihan ini, akan mempunyai dampak yang sangat baik, karena antara penyuluh dari LSM, Perguruan Tinggi, dan Pemda dapat saling melengkapi dalam mendampingi masyarakat Gunung Kidul.

Mengkaji hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat Kelembagaan pendukung pembelajaran terhadap intensitas belajar petani HRL di Gunung Kidul, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pendukung yang cukup kolaboratif di Gunung Kidul dapat menghasilkan intensitas belajar petani

yang lebih baik, dan dapat dijadikan contoh untuk dikembangkan di tempat lain. Kegiatan pembelajaran HRL di Gunung Kidul telah direncanakan bersama antar institusi yang terlibat dalam Pokja, dan telah disepakati peranan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Hanya sayangnya pelaksanaan di lapangan, belum bersinergi seperti yang diharapkan. Bila dikaitkan dengan pendapat Reed (2004) berkaitan dengan jenis hubungan antar institusi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, hubungan antar institusi pendukung pembelajaran di Gunung Kidul dapat dikatakan termasuk jenis kolaborasi (*collaboration*). Reed (2004) membedakan kerja sama (*cooperation*), kolaborasi (*collaboration*) dan kemitraan sesungguhnya (*true partnership*). Kolaborasi adalah tipe hubungan antar institusi dimana misi institusi yang bermitra saling tumpang tindih (*overlap*), dan masing-masing pihak menyepakati peranan yang setara dari misinya melalui perencanaan bersama. Tingkatan hubungan kolaborasi lebih tinggi dari kerja sama (*cooperation*) tetapi di bawah *true partnership*.

Bila dikaitkan dengan pendapat Handy (1985), yang diacu Pretty (1997), bahwa bentuk kolaborasi dimulai dengan *forming*, *storming*, *norming*, dan *performing*, maka di Gunung Kidul dapat dikatakan sudah mencapai tahapan *performing* dimana Pokja dapat melakukan pekerjaan lebih efektif sebagai sebuah tim kerja. Hal tersebut dapat terbukti dengan diduplikasinya sertifikasi Ekolabel pada kayu hutan rakyat dari wilayah binaan mereka dan langkah nyata ke arah terbitnya Perda HRL yang dirumuskan bersama oleh Pokja. Sedangkan di Wonogiri dapat dikatakan bahwa belum memasuki tahapan manapun, termasuk tahapan *forming*. Karena sejak dari awal kegiatan sertifikasi tidak ada kesepakatan dan kesepahaman antara Pemda (Dinas Kehutanan) dan LSM pendamping.

Peningkatan Peran Kelembagaan Pendukung dalam Intensitas Belajar Petani

Salah satu kelemahan dalam kelembagaan pendukung pembelajaran HRL di Gunung Kidul ialah kurangnya keterlibatan swa-

sta. Baik pada pelaksanaan di lapangan, maupun dalam Pokja masih sangat kurang atau bahkan belum ada keterlibatan pihak swasta, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran, penting sekali dilibatkan. Memang saat ini Pokja HRL di Gunung Kidul melaksanakan pengembangan HRL yang penekanannya pada pengelolaan hutan secara lestari, bukan pada sertifikasinya. Saat ini fokus masih terarah pada sosialisasi HRL, belum dikaitkan dengan program pasca panen atau pemasarannya sehingga belum melibatkan pihak swasta. Namun ke depan untuk peningkatan pengaruh kelembagaan pendukung pembelajaran pada intensitas belajar petani perlu dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta dalam pokja ini.

Keterlibatan swasta dalam Pokja diharapkan dapat ikut merumuskan konsep pemasaran hasil HRL sehingga mendapatkan hasil yang lebih tinggi, dan petani memiliki posisi tawar yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kraenzel (2001) bahwa pendekatan *whole person* yang dipopulerkan oleh Apps (1996) dalam pendidikan orang dewasa, dibutuhkan dalam membangun hubungan dalam pemasaran hasil pertanian, agar petani mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perspektif hubungan kerja dalam pemasaran hasil pertanian telah bergeser dari yang berorientasi pada pengawasan (*control oriented*), dikenal dengan "*I win you lose*" ke arah orientasi pada komitmen (*commitment oriented*) untuk mencapai tujuan bersama, dikenal dengan "*I win you win*".

Selain kelemahan pada kelembagaan pemasaran, kelemahan yang ada dalam kelembagaan pendukung pembelajaran HRL baik di kedua lokasi penelitian ialah kurangnya mengakomodir kebutuhan, nilai-nilai masyarakat dalam pembelajaran. Para penyuluh dan pendamping maupun institusi pembinanya masih lebih banyak menekankan kompetensi teknis dan belum banyak mengembangkan kapasitas masyarakat ke pemecahan permasalahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Narayan (1993), yang diacu Pretty (1997) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh seberapa banyak faktor dalam kelembagaan eksternal yang merupa-

kan kebutuhan atau minat masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa kesuksesan kelembagaan eksternal ditentukan oleh sejauhmana kelembagaan eksternal mengakomodir orientasi utama atau nilai-nilai, kebutuhan dan minat masyarakat lokal, respons selama pelaksanaan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengambil keputusan.

Keberadaan BP2KP di Gunung Kidul seharusnya dapat meningkatkan pembelajaran masyarakat HRL. Saat ini BP2KP belum terlibat dalam Pokja, tetapi sebagai institusi yang memiliki tupoksi dalam pemberdayaan masyarakat dan instansi pembina para penyuluh kehutanan maka sudah seharusnya BP2KP dilibatkan Pokja HRL. Bahkan peranan BP2KP dalam menyusun program pembelajaran HRL, pelatihan penyuluh pendamping sebagai pelaksana teknis pembelajaran masyarakat di lapangan sangat penting bagi pengembangan HRL di Gunung Kidul.

Mengacu kepada Pretty (1997) serta Moyo dan Hagman (1999) untuk pembangunan berkelanjutan diperlukan kelembagaan atau organisasi yang lebih terdesentralisasi, merupakan tim multidisipliner, fleksibel dan heterogen serta output sesuai dengan permintaan atau kebutuhan petani. Kelembagaan eksternal harus realistis, cepat menanggapi masukan sehingga perlu memiliki respons adaptif untuk perubahan. Pembelajaran harus ditetapkan pada pemecahan masalah, interaktif dan berdasarkan kondisi di lapangan.

Keterkaitan antara kelembagaan pendukung pembelajaran yang lebih baik, ialah bagaimana mengkaitkan antara penelitian, penyuluhan, pendidikan bagi masyarakat. Dimana masing-masing lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berlainan namun memiliki keterkaitan dan saling melengkapi, bekerja secara sinergis sehingga proses pembelajaran masyarakat dapat berjalan lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Roling (1989) Rivera dan Schram (1987), yang diacu dalam Rivera, Qamar dan Mwandemer (2005) bahwa sekumpulan institusi menjadi sebuah sistem jika komponennya terkait satu dengan lainnya, dan institusi yang terpisah tersebut saling terhubung sehingga dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan untuk saling

berbagi sumberdaya manusia, fisik dan finansial untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Sistem ini dikenal dengan *Agricultural Knowledge Information System (AKIS)*, yang terdiri dari tiga institusi yaitu penelitian, penyuluhan, kelembagaan pendidikan pertanian dengan petani sebagai pusat dari tujuan sistem tersebut, yaitu pelayanan terhadap petani.

Seiring dengan perkembangannya AKIS berkembang menjadi AKIS/RD, yang mengutarakan 4 mayor subsistem dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu: 1) subsistem penciptaan pengetahuan; 2) subsistem difusi pengetahuan; 3) subsistem penggunaan pengetahuan; 4) subsistem pendukung pertanian, terdiri dari kredit, input dan fungsi pasar. Pernyataan ini menguatkan hasil penelitian di atas bahwa dalam POKJA perlu dimasukkan pihak swasta yang tergolong dalam subsistem pendukung: yang menyediakan kredit, dan khususnya pemasaran. Bila dikaitkan dengan AKIS/RD, POKJA Hutan Rakyat Lestari di Gunung Kidul dapat dikatakan atau berfungsi sebagai sebuah sistem, yang terdiri dari subsistem pendidikan, penelitian, penyuluhan, informasi dan pemasaran sebagai subsistem tambahan dari keanggotan POKJA yang ada saat ini.

Kelembagaan pendukung pembelajaran yang berkolaborasi, sudah merupakan keharusan dalam pengelolaan kehutanan berkelanjutan ke depan. Mengacu pada AKIS, yang disebarkan oleh FAO (2005), diperlukan pendekatan sistem dalam penyuluhan. Sistem penyuluhan terdiri dari 5 sub sistem yang saling terkait, yaitu sub sistem penelitian, sub sistem pendidikan, sub sistem *support system*, sub sistem penyuluhan dan sub sistem petani. Dimana semua sub sistem ini saling terkait satu dengan yang lainnya dan masing-masing sub sistem memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dan saling interdependensi. Dikaitkan dengan model AKIS yang dikembangkan oleh FAO, maka satu sub sistem yang belum ada dalam POKJA yaitu keterlibatan *support system*, yang melayani kredit, pemasaran dan lainnya.

Pokja HRL di Gunung Kidul, merupakan salah satu bentuk kolaborasi kelembagaan pendukung, yang menghasilkan pembelajaran

petani HRL yang lebih baik dibandingkan dengan Wonogiri. Pada kelembagaan pendukung pembelajaran di Wonogiri kurang adanya kerja sama, bahkan cenderung mengarah kepada hubungan yang kurang harmonis. Dan bila dikaitkan dengan AKIS, masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena pada kelembagaan pendukung di WG baru terdapat satu sub sistem yaitu penyuluhan saja, sedangkan sub sistem lainnya tidak ada.

Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan terdapat kesamaan visi, misi dan tujuan sistem yang mengikat semua sub sistem di dalamnya, sehingga walaupun masing-masing lembaga sebagai sub sistem tetap menjalankan fungsi dan perannya masing-masing, tetapi secara bersamaan mereka juga memperjuangkan tujuan sistem dimana mereka bergabung. Dengan demikian perlu ada pembagian peran dan tugas, yang tegas, yang mencakup penyediaan sarana, prasarana, fasilitas dan personil pendukung yang menjamin tercapai tujuan bersama.

Dikaitkan dengan hasil analisa SEM, aspek kelembagaan pendukung pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi intensitas belajar petani adalah dukungan kegiatan dan personil yang kompeten. Maka untuk pengembangan intensitas belajar petani HRL, perlu diwujudkan kegiatan konkrit yang lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas petani, sesuai kebutuhan petani dan lebih berorientasi pada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani khususnya yang berkaitan dengan HRL. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan oleh kelembagaan pendukung yang berkolaborasi secara sinergis dan sistemik. Demikian juga kelembagaan pendukung perlu mendukung personil-personil yang kompeten dan dapat bersinergi dengan personil dari lembaga lain, serta saling melengkapi dalam pendampingan pembelajaran melalui kegiatan bersama. Untuk itu penting bagi kelembagaan pendukung pembelajaran mengadakan pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas personil-personil agar dapat melakukan pendampingan petani dengan baik. Selain dari itu kelembagaan pendukung pembelajaran perlu terus mensosialisasikan visi, misi dan tujuan bersama sehingga dapat dicapai kese-

pahaman, kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Dengan adanya perhatian terhadap aspek-aspek tersebut di atas, diharapkan intensitas belajar petani HRL dapat ditingkatkan, khususnya berkaitan dengan interaksi antara petani dengan penyuluh dan pendamping, serta interaksi antara petani dengan materi belajar.

Kesimpulan

Kelembagaan pendukung pembelajaran petani Hutan Rakyat Lestari di Gunung Kidul dan Wonogiri berbeda. Kelembagaan pendukung pembelajaran Hutan Rakyat Lestari di Gunung Kidul bersinergis, berkolaborasi dalam satu Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari yang ditetapkan oleh Bupati. Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemda (Dishutbun, Bappeda), dan petani Hutan Rakyat. Sedangkan lembaga pendukung pembelajaran Hutan Rakyat Lestari di Wonogiri, khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi, didominasi oleh LSM Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), dan sedikit sekali keterlibatan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Intensitas belajar petani Hutan Rakyat Lestari tergolong rendah. Rendahnya intensitas belajar petani dipengaruhi oleh kelembagaan pendukung pembelajaran yang tidak berkolaborasi dan tidak sistemik. Aspek kelembagaan pendukung pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi intensitas belajar petani Hutan Rakyat Lestari terutama adalah dukungan kegiatan dan dukungan personal;

Pengaruh kelembagaan pendukung pembelajaran Hutan Rakyat Lestari di Gunung Kidul dan Wonogiri terhadap intensitas belajar petani dapat ditingkatkan melalui: (1) pelaksanaan kegiatan konkrit yang berkelanjutan, yang difokuskan pada pemberdayaan petani dan pemecahan permasalahan petani; (2) kegiatan dilakukan secara bersinergi antar institusi dan sistemik; (3) kegiatan didukung oleh personal kelembagaan pendukung pem-

belajaran yang kompeten. Kelembagaan pendukung pembelajaran petani Hutan Rakyat Lestari yang berkolaborasi dan sistemik membutuhkan kelengkapan institusi yang berkaitan dengan fungsi penyuluhan, pendidikan, penelitian, pemasaran, dan perkreditan.

Daftar Pustaka

- Awang SA, Santoso H, Widayanti WT, Nugroho Y. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Yogyakarta: CV Debut Press.
- Darusman. 1995. *Hutan Rakyat: Pengembangan Strategis Kehutanan dalam Pembenahan Kehutanan Indonesia*, Dokumentasi Kronologi Tulisan 1986-2002. Bogor: Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial dan Yayasan Dani Hanifah.
- FAO. 2005. *Enhancing Coordination Among AKIS/RD Actors: An analytical and Comparative Review of Country Studies on Agricultural Knowledge and Information System For Rural Development (AKIS/RD)*. Rome: Food And Agriculture Organization of The United Nations.
- Jarvis P. 1985. *The Sociology of Adult and Continuing Education*. London: Croom Helm.
- Klausmeier HJ, Goodwin W. 1971. *Learning and Human Abilities: Educational Psychology*. Fourth Ed. New York: Harper & Row Publisher.
- Knowles M. 1979. *The Adult Learner: A Neglected Species*. Second Edition. Texas: Gulf Publishing Company.
- Koentjaraningrat. 1992. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kraenzel DG. 2001. *Building Working Relationships in Agricultural Marketing*. Di dalam *Journal of Extension* 39. <http://joe.org/joe/2001february/ttl.html> [6 agustus 2010]
- Moyo E, Hagmann J. 1996. *A Learning Together Through Participatory Extension*. Zimbabwe: Department of

- Agricultural, Technical and Extension Services (AGRITEX).*
- Pretty JN, Roling N. 1997. *Extension's Role in Sustainable Agricultural Development*. Di dalam : *Improving Agricultural Extension A Reference Manual*. Editor: Swanson BE, Bentz RP, Sofranko AJ. Rome : Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Pretty JN. 1995. *Regenerating Agriculture: Policies and Practise for Sustainability and Self-Reliance*. London: Earthscan Publications Ltd.
- Reed AS. 2004. *Strategic Relationships: Engaging for Cooperation, Collaboration and Partnerships*. Di dalam *Proceedings of IUFRO Forestry Extension Conference*, 28 September – 2 October 2003, Troutdale, Oregon USAH. 2003.
- Seng OT *et.al.* 2001. *Educational Psychology*. Singapore: Seng Lee Press.
- Soemanto WS. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana SHD. 2000. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Falah Production
- Suryabrata, S. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pr.